

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berada di wilayah rawan terhadap fenomena alam seperti bencana geologi seperti gempa bumi, gunung berapi, tanah longsor, tsunami dan hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, pasang surut, gelombang besar, dan lain-lain. Berada di daerah tropis (khatulistiwa) membuat Indonesia rawan terhadap badai dan angin topan yang sering terjadi di garis khatulistiwa yang banyak menerima sinar matahari sehingga terjadi penguapan yang kuat, mengakibatkan hujan lebat, membuat Indonesia rawan banjir.

Kabupaten Aceh Tenggara dikenal sebagai salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana alam, khususnya banjir. Letaknya yang berada di kawasan pegunungan dan lembah menyebabkan tingginya curah hujan berisiko memicu luapan sungai. Karakteristik geografis ini membuat sistem drainase alami tidak mampu menampung aliran air saat intensitas hujan tinggi, sehingga meningkatkan kerentanan wilayah terhadap banjir yang berulang.

Berdasarkan pasal 18 dalam undang – undangan nomor 24 tahun 2007 mengamanatkan dibentuknya badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) ditingkat provinsi maupun kabupaten atau kotamadya, dengan ditetapkannya undang – undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan akan membaik, karena pemerintahan dan pemerintah daerah yang menjadi penanggulan bencana. Penanggulangan bencana dilakukan secara terarah mulai prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2019 yang menjelaskan tentang tugas dan fungsi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam melakukan penanggulangan terhadap bencana yang meliputi beberapa tahap seperti pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat terhadap bencana, rehabilitasi serta rekonstruksi bencana.

Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 yang menjelaskan tentang Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Aceh Tenggara yang meliputi kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang menjadi ujung tombak dalam menanggulangi bencana alam yang ada di daerah kota – kota indonesia.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tenggara memainkan peran vital sebagai ujung tombak pemerintah daerah dalam mitigasi, kesiapsiagaan, respons, hingga pemulihan pascabencana. Lembaga ini tidak hanya bertugas dalam pengendalian situasi darurat, tetapi juga memiliki tanggung jawab jangka panjang dalam membangun ketangguhan masyarakat melalui pendekatan holistik berbasis risiko.

Pada saat prabencana kesiapsiagaan merupakan elemen krusial dalam siklus penanggulangan bencana. BPBD membentuk dan mengaktifkan Tim Reaksi Cepat (TRC) yang selalu siaga selama 24 jam. Tim ini dibekali dengan pelatihan berkala,

sistem komunikasi yang terintegrasi, serta peralatan penanggulangan bencana untuk memastikan kecepatan dan efektivitas respons pada saat kejadian darurat terjadi. Di tingkat komunitas, BPBD melaksanakan sosialisasi dan edukasi melalui berbagai program, termasuk pelatihan simulasi evakuasi dan penyuluhan tentang bahaya banjir. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, membangun budaya tanggap bencana, dan menciptakan jejaring relawan lokal yang mampu membantu penyelamatan awal secara mandiri sebelum bantuan eksternal tiba. *AJNN.net*

Saat bencana koordinasi lintas sektor menjadi strategi penting dalam mempercepat respons bencana. BPBD bekerja sama erat dengan BNPB, TNI, Polri, Dinas Sosial, organisasi kemasyarakatan, serta lembaga kemanusiaan lainnya. Sinergi ini menciptakan sistem kerja terpadu yang memungkinkan mobilisasi sumber daya, tenaga, dan informasi secara cepat dan tepat sasaran saat bencana melanda. Salah satu bentuk konkret dari respons cepat BPBD adalah penyediaan bantuan logistik darurat seperti tenda, makanan siap saji, air bersih, dan obat-obatan. Bantuan ini disalurkan langsung ke lokasi terdampak dengan prioritas pada kelompok rentan, seperti lansia, anak-anak, dan ibu hamil. Proses distribusi dilakukan dengan koordinasi posko dan sistem pendataan korban. *ANTARA.News*.

Pasca bencana, BPBD segera melakukan pembersihan wilayah terdampak bersama masyarakat dan relawan. Aktivitas ini mencakup pengangkutan lumpur dari jalanan, pemulihan fungsi sekolah, fasilitas kesehatan, dan tempat ibadah yang terdampak banjir. Upaya ini mempercepat kembalinya aktivitas sosial dan ekonomi warga secara bertahap. BPBD juga menginisiasi asesmen cepat untuk mengidentifikasi skala kerusakan pada infrastruktur, lahan pertanian, serta

bangunan warga. Informasi yang dikumpulkan menjadi acuan dalam penyusunan rencana rehabilitasi jangka pendek dan rekonstruksi jangka panjang, sekaligus sebagai laporan resmi kepada pihak pemerintah provinsi maupun pusat.

HabaAceh.id

Dalam pelaksanaan rehabilitasi, BPBD mengintegrasikan kerja sama teknis dan finansial dengan berbagai instansi seperti Dinas PUPR, Dinas Perkim, dan lembaga donor. Fokus utama diarahkan pada perbaikan jembatan, jalan rusak, serta instalasi sanitasi yang rusak akibat banjir, dengan harapan dapat mengembalikan akses dan layanan dasar masyarakat. Rekonstruksi tidak hanya bertujuan membangun kembali apa yang rusak, tetapi juga mengedepankan prinsip pembangunan berketahanan. Setiap infrastruktur yang dibangun harus memenuhi standar ketahanan bencana, termasuk penguatan struktur bangunan, penggunaan bahan ramah lingkungan, dan perencanaan berbasis risiko jangka panjang.

ANTARA.News.

Pemantauan terhadap program yang telah dijalankan menjadi indikator penting dalam memastikan efektivitas intervensi. BPBD melakukan evaluasi secara berkala melalui forum koordinasi dan pelaporan kinerja. Temuan dari proses ini menjadi bahan pembelajaran untuk penyempurnaan kebijakan dan pengambilan keputusan di masa mendatang. Pengembangan kapasitas internal BPBD menjadi prioritas agar lembaga ini semakin profesional dan responsif. Pelatihan teknis, peningkatan literasi kebencanaan, serta sertifikasi personel menjadi bagian dari upaya membangun SDM yang kompeten dan siap menghadapi kompleksitas bencana yang terus berkembang.

Keterlibatan masyarakat tetap menjadi kunci dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang inklusif dan berkelanjutan. BPBD secara aktif mengajak masyarakat untuk terlibat dalam forum siaga bencana, pemantauan lingkungan, serta pengumpulan data lokal yang berguna dalam sistem peringatan dini dan respon cepat. Dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, lembaga non-pemerintah, serta dunia usaha, Kabupaten Aceh Tenggara diharapkan mampu menekan risiko bencana dan memperkuat daya lenting sosial serta ekonomi masyarakat. Pengalaman masa lalu dijadikan bekal untuk membentuk sistem penanggulangan bencana yang adaptif dan berorientasi pada masa depan. *ANTARA.News*

Gambar 1.1
Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Aceh Tenggara



Sumber: ANTARA News

Hasil dokumentasi di atas diambil dari kejadian banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 14 November 2023 dimana bencana ini tidak di sangka - sangka turunnya air dan bebatuan yang merenggut nyawa balita, bahkan rusaknya akses jalan akibat kurangnya kesiapsiagaan warga dalam menghadapi saat terjadi bencana banjir bandang tersebut, ini merupakan suatu kelalaian atau kecerobohan masyarakat pada saat bencana banjir, dengan demikian

dapat kita ketahui bahwa Badan Penanggulangan bencana daerah masih kurang baik dalam mengedukasi atau mengevaluasi pada saat menghadapi bencana banjir. Adapun beberapa data berita bencana banjir yang telah terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, dapat kita lihat dibawah ini :

Tabel 1.1 Data Berita Banjir Di Kabupaten Aceh Tenggara

No	Peristiwa	Korban	Dampak peristiwa	Tahun
1	Banjir bandang	1.539 jiwa	Kerusakan 6 rumah	30/09/2020
2	Banjir	216 KK/791 jiwa	Kerusakan tanggul sungai ketambe	26/10/2021
3	Banjir bandang	1.846 jiwa	Kerusakan 2 rumah,	01/11/2022
4	Banjir bandang	6.571 jiwa, 1 balita meninggal dan 2 jiwa mengalami luka	Kerusakan 8 rumah, 1 masjid, dan 1 rumah sekolah	14/11/2023
5	Banjir	3.236 jiwa	Kerusakan puluhan lahan pertanian	09/10/2024

Sumber : <https://www.bnpb.go.id> di akses 15 Mei 2025

Diskominpo Aceh Tenggara Ali Amran mengungkapkan : selama 2024 Aceh Tenggara lebih dari 50 kali bencana alam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencatat, selama tahun 2024, tercatat 50 kali kejadian bencana alam dan non alam yang terjadi di seantro Aceh Tenggara. Kejadian tersebut mulai dari musibah bencana alam banjir sungai, banjir bandang, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, kabakaran pemukiman penduduk serta orang hanyut di sungai.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Aceh Tenggara, Mohd. Asbi ST, Kamis (9/1) mengatakan, angka atau intensitas kejadian bencana tahun 2024, sedikit mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan kejadian bencana di tahun 2023 lalu. Di tahun 2024 lalu, ada 50 kejadian bencana, sedangkan di tahun 2023 terjadi 40 kejadian bencana, Ujar Asbi Selian. Asbi juga menjelaskan, peristiwa kebakaran pemukiman penduduk merupakan kejadian bencana yang paling dominan

sepanjang tahun 2024 lalu, dengan jumlah 26 kejadian peristiwa. Kemudian, disusul bencana banjir yang terjadi sebanyak 15 kali, kebakaran hutan dan lahan 7 kejadian, empat kejadian longsor, orang hanyut 5 kejadian, peristiwa angin puting beliung terjadi sebanyak 2 kali dan satu kali banjir bandang melanda Aceh Tenggara sepanjang Tahun 2024. Kepala Pelaksana BPBD juga menyebutkan, nilai kerugian materil akibat bencana yang terjadi di tahun 2023, diperkirakan mencapai Rp17,9 miliar dan di tahun 2024, kerugian akibat bencana semakin bertambah jumlahnya, diperkirakan mencapai Rp53,1 miliar. Kerugian materil tersebut, dihitung dari jumlah kerusakan infrastruktur, harta benda warga dan lahan pertanian yang terdampak bencana bencana yang dicatat oleh pihak BPBD Aceh Tenggara (AJNN.net, 2024; AcehOnline.co, 2024)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui media masa terdapat permasalahan bencana alam, yaitu kerentanan terjadinya banjir yang melanda wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tugas pokok secara integritas dalam menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Aceh Tenggara, seperti adanya tahap pencegahan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi / rekontruksi. Namun di balik tahapan tersebut juga belum maksimal dalam melakukan atau melaksanakan tugas yang sudah mereka tetapkan sebelumnya, dilihat dari meningkatnya dan memparahnya korban banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara.

Merujuk ke belakang, dari banyaknya rentetan kejadian bencana yang terjadi dari tahun ke tahun. Maka Tahun 2025 ini BPBD Aceh Tenggara akan terus berupaya untuk meminimalisir potensi terjadinya kejadian bencana alam, kerusakan maupun korban akibat bencana alam maupun non alam dengan lebih

fokus melakukan mitigasi, penanganan atau penanggulangan yang lebih baik lagi kedepan.

Jika mengacu pada data tabel 1.1 dapat diketahui bahwa, pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya dalam menanggulangi bencana banjir, berdasarkan dari data di atas hampir setiap tahun meningkatnya dampak dari bencana banjir yang menimbulkan banyak korban, baik dari segi korban jiwa, maupun kehilangan harta, serta kerusakan infrastruktur lainnya. Oleh karna itu tertariklah hati peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanganan Bencana Banjir di Kabupaten Aceh Tenggara

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penanggulangan bencana daerah dalam menangani bencana banjir di Kabupaten Aceh Tenggara?
2. Apa saja hambatan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah dalam menangani bencana banjir di Kabupaten Aceh Tenggara?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka fokus penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penanggulangan bencana daerah dalam penanganan bencana banjir di Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Hambatan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah dalam menangani bencana banjir di Kabupaten Aceh Tenggara

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka fokus penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penanggulangan bencana daerah dalam menangani bencana banjir di Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah dalam menangani bencana banjir di Kabupaten Aceh Tenggara.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan badan penanggulangan bencana daerah dalam penanganan bencana banjir di Kabupaten Aceh Tenggara, dan memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu administrasi publik dan ilmu kebencanaan.

2. Manfaat Praktis

Membantu badan penanggulangan bencana daerah dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif untuk menangani bencana banjir. Dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir dan meminimalisir dampak negatif dari bencana banjir, baik terhadap korban jiwa maupun harta benda.

3. Manfaat Teoritis

Memperkaya ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan badan penanggulangan bencana daerah dalam penanganan bencana, dan mengembangkan teori-

teori baru tentang pengelolaan bencana di daerah. Serta memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu administrasi publik dan ilmu kebencanaan.